

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-02 pelaksanaan Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024-2026.


Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 03 Februari 2026  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKALAN



M. HASBULLAH, SE., MM  
NIP. 19720131 200801 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut SATUAN POLISI PAMONG PRAJA diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas: membantu tugas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

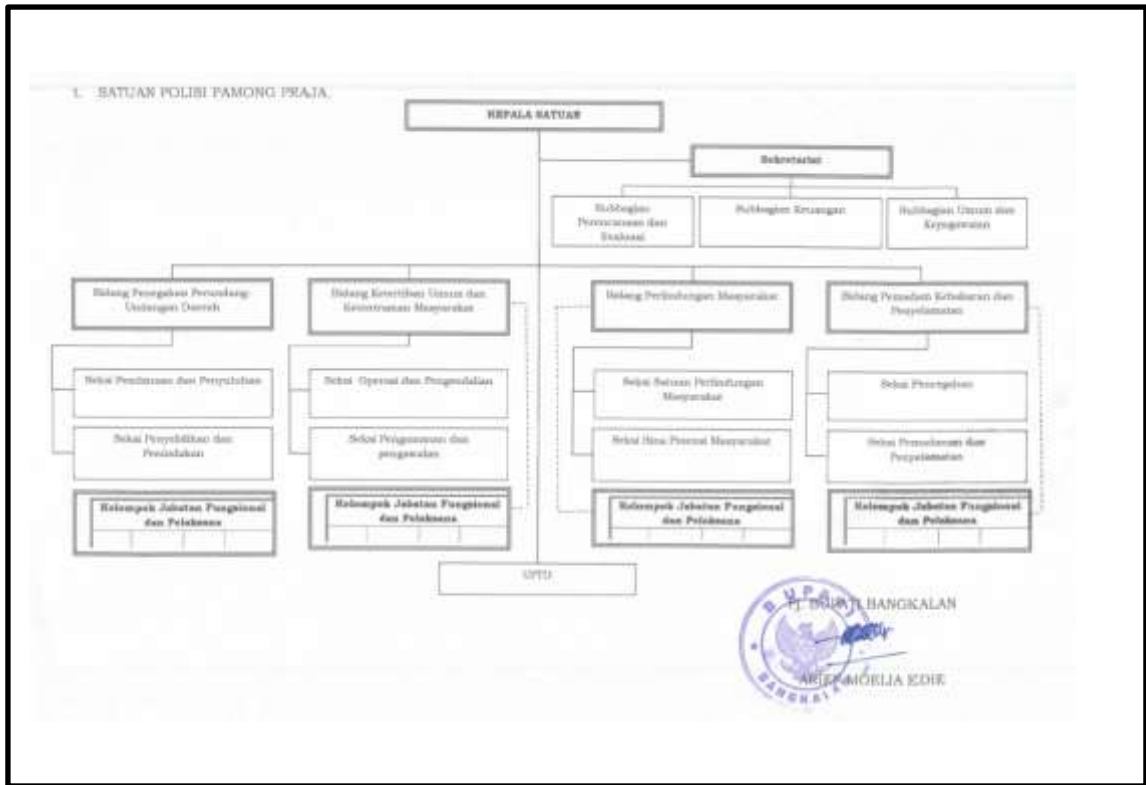
- perumusan kebijakan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Satuan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

Gambar 1.1.

### Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



### B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Menjamurnya pedagang kaki lima ditempat terlarang
2. Pemanfaatan lahan milik pemerintah kabupaten yang dikelola oleh pihak lain
3. Terbatasnya sarana dan prasarana di lapangan serta masih kurang memadai kendaraan operasional di Satuan Polisi Pamong Praja
4. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal
5. Kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Perda dan Perkada masih rendah
6. Pelayanan Pemadaman Kebakaran Kurang Maksimal
7. Hanya memiliki satu pos untuk melayani 18 kecamatan dalam wilayah manajemen kebakaran
8. Peralatan yang belum lengkap guna menunjang tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Belum maksimal dalam pencapaian SPM khususnya pencapaian respon time
10. Belum maksimalnya informasi tentang pentingnya fungsi dan keberadaan Satlinmas Desa

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan terhadap pedagang kaki lima untuk berpindah tempat
2. Beberapa tempat sudah ada yang dibersihkan
3. Tetap memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja
4. Selalu menghimbau dan memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja
5. Selalu menghimbau dan melakukan patroli
6. Selalu memberikan pelayanan Pemadaman Kebakaran dengan Maksimal untuk masyarakat

7. Tetap memanfaatkan 1 pos untuk melayani 18 kecamatan dalam wilayah manajemen kebakaran
8. Selalu memberikan pelayanan maksimal untuk Masyarakat walaupun Peralatan yang belum lengkap
9. Selalu berusaha maksimal dalam pencapaian SPM khususnya pencapaian respon time
10. Melakukan kegiatan edukasi dengan Satlinmas Desa

### **C. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

#### E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA merupakan hasil kesepakatan bersama antara SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Guna mewujudkan tujuan daerah yang ke-4 dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan yaitu “Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian Masyarakat
2. Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	7,95%	8,02%	8,72%
		Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan	90%	95%	100%

	edukasi dan pengendalian masyarakat	masyarakat yang dapat diselesaikan			
	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	67%	70%
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85	61,25	61,85
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	86,00	87,00

Sumber : Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2024-2026

## 1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	Persentase	Jumlah penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu - Jumlah Pelanggaran Tahun Ini/ Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu x 100%	Bidang Trantibum
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk x 100%	Bidang Trantibum, Bidang PerUU, Bidang Linmas
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Persentase	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Jumlah Kebakaran yang memenuhi Respon Time/ Jumlah Total Kebakaran x 100%	Bidang Pemadam Kebakaran

1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	Nilai	Nilai SAKIP PD	Nilai Komulatif dari 4 (empat) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP (Inspektorat)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Perhitungan terhadap survey yang dilakukan kepada penerima pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretariat

Sumber : Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025

## B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	Persentase	8,02%
		Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	95,00%
		Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Persentase	67,00%
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta	Nilai SAKIP PD	Nilai	61,25

		perlindungan masyarakat			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00

Sumber : Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2025

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 14 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	95,00%

2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	67,00%
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	61,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00

Sumber : Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA :

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum	100	%
1.1	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100	%
1.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10	laporan

1.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1	laporan
1.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	dokumen
1.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3	dokumen
1.1.7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	laporan
1.2	<b>KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA</b>	<b>Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup</b>	100	%
1.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	29	laporan
1.2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1	laporan
2	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase pelayanan penanggulangan bencana</b>	100	%
2.1	<b>KEGIATAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</b>	100	%
2.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	80	orang

2.1.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20	orang
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase kejadian kebakaran yang ditangani</b>	100	%
3.1	<b>KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran</b>	100	%
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4	dokumen
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	laporan
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2	dokumen
3.1.4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	9	unit
3.3	<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran</b>	100	%

3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200	orang
3.4	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASI Pencarian dan Pertolongan TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan</b>	100	%
3.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3	unit
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	%
4.1	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan</b>	100	%
4.1.1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen
4.1.3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen
4.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen

4.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen
4.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan
4.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan
4.2	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	orang/bulan
4.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan
4.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan
4.3	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
4.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen
4.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	laporan
4.4	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>%</b>

4.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang
4.5	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi</b>	100	%
4.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket
4.5.2	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	laporan
4.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan
4.6	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%
4.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan
4.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan
4.7	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	100	%
4.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	unit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja

Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	8,02%	3,09%	39%	Sangat Rendah	Bidang Trantibum
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	95,00%	100,00%	105%	Sangat Tinggi	Bidang Trantibum, Bidang PerUU, Bidang Linmas
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	67,00%	75%	112%	Sangat Tinggi	Bidang Pemadam Kebakaran
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	61,25	63,65	104%	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi AKIP (Inspektorat)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	82,34	96%	Sangat Tinggi	Sekretariat

Uraian penjelasan tabel:

1. Target pada indicator Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada adalah sebesar 8,02% dengan realisasi 3,09% sehingga capaiannya sebesar 39%
2. Target pada indicator Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan adalah sebesar 95,00% dengan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 105%
3. Target pada indicator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time adalah sebesar 67% dengan realisasi 75% sehingga capaiannya sebesar 112%
4. Target pada indicator :
  - a. Nilai SAKIP PD adalah sebesar 61,25 dengan realisasi 63,65 sehingga capaiannya sebesar 104%

- b. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 86,00 dengan realisasi 82,34 sehingga capaiannya sebesar 96%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025		
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/ perkada	-	-	4,35%	7,95%	8,02%	3,09%	38,53%
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	-	-	99%	98%	95,00%	100,00%	105,26%
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	-	-	68%	64%	67,00%	75%	111,94%
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	-	-	60,39	60,3	61,25	63,65	103,92%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85,14	88	86,00	82,34	95,74%

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/ perkada pada tahun 2024 terealisasi 7,95%. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 terealisasi sebesar 3,09% maka terdapat penurunan jumlah pelanggaran perda/ perkada jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Indikator kinerja Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun 2024 terealisasi 98%. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 terealisasi sebesar 100% maka ada peningkatan.
3. Indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time pada tahun 2024 terealisasi sebesar 64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 terealisasi sebesar 75% maka ada peningkatan.
4. Indikator Nilai SAKIP PD pada tahun 2024 terealisasi sebesar 60,30. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 terealisasi 63,65 maka ada peningkatan.
5. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 terealisasi sebesar 88,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 terealisasi sebesar 82,34 maka ada penurunan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET AKHIR 2025	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5*100)
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	3,09%	8,02%	38,53%
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	100,00%	95,00%	105,26%

1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	75,00%	67,00%	111,94%
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	63,65	61,25	103,92%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,34	86,00	95,74%

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,09%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 8,02%, maka Tingkat kinerja mencapai 38,53%.
2. Indikator kinerja Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 95%, maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 105,26%
3. Indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time pada tahun 2025 terealisasi sebesar 67%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 75%, maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 111,94%
4. Indikator kinerja Nilai SAKIP PD pada tahun 2025 terealisasi sebesar 63,65. Jika dibandingkan dengan target sebesar 61,25 maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 103,92%
5. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 terealisasi sebesar 82,34. Jika dibandingkan dengan target sebesar 86,00 maka Tingkat kemajuan kinerja mencapai 95,74%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/  
Kabupaten/Kota lain**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5*100)
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	3,09%	-	-
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	100,00%	-	-
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	75,00%	-	-
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	63,65	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,34	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

## Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	8,02%	3,09%	38,53%	bertambahnya pelaku usaha baik dari kabupaten Bangkalan maupun dari luar daerah dan jumlah perijinan pemasangan iklan/reklame yang telah habis masa ijin pemasangannya	
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	95,00%	100,00%	105,26%	Aparatur Satpol PP yang loyal terhadap Institusi Pemerintah Bangkalan dengan melakukan patroli wilayah bangkalan dan dengan pendekatan yang humanis dengan masyarakat	
1.2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	67,00%	75,00%	111,94%	Aparatur Pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selalu siap siaga demi masyarakat	
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	61,25	63,65	103,92%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	82,34	95,74%		

Uraian penjelasan tabel:

1. Analisis keberhasilan/kegagalan : Pelanggaran yang masih tinggi disebabkan karena bertambahnya pelaku usaha baik dari kabupaten Bangkalan maupun dari luar daerah dan jumlah perijinan pemasangan iklan/reklame yang telah habis masa ijin pemasangannya. Pelanggaran

tersebut ditemukan setiap melakukan patroli rutin wilayah kabupaten Bangkalan.

Solusi yang dilakukan : Meningkatkan kinerja aparatur Satpol PP dan memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan.

2. Analisis keberhasilan/kegagalan : Aparatur Satpol PP yang loyal terhadap Institusi Pemerintah Bangkalan dengan melakukan patroli wilayah bangkalan dan dengan pendekatan yang humanis dengan Masyarakat

Solusi yang dilakukan : mempertahankan kinerja aparatur Satpol PP dan memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan.

3. Analisis keberhasilan/kegagalan : Aparatur Pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selalu siap siaga demi masyarakat

Solusi yang dilakukan : mempertahankan kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan.

4. Analisis keberhasilan/kegagalan : Implementasi akuntabilitas kinerja sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan walaupun tidak mendasar pada Satuan Polisi Pamong Praja

Solusi yang dilakukan : mengoptimalkan Upaya implementasi SAKIP di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

5. Analisis keberhasilan/kegagalan : Pelaksanaan pelayanan public di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan secara umum mencerminkan Tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 82,34 namun ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024

Solusi yang dilakukan : meningkatkan lagi pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja atau minimal mempertahankan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	3,09 %				
1.1	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	100,00 %				
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum	100,00 %	Menunjang
				<b>KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100,00 %	Menunjang
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100,00 %	Menunjang
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100,00 %	Menunjang

				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,0 0%	Menunj ang
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100,0 0%	Menunj ang
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100,0 0%	Menunj ang
				<b>KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA</b>	<b>Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Menunj ang</b>
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompo k Masyarakat/Pelaku Usaha/	100,0 0%	Menunj ang
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100,0 0%	Menunj ang
				<b>PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA</b>	<b>Persentase pelayanan penanggulangan bencana</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Menunj ang</b>
				<b>KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Menunj ang</b>
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100,0 0%	Menunj ang
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100,0 0%	Menunj ang

1. 2	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	75,00 %				
				<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase kejadian kebakaran yang ditangani</b>	<b>100,00%</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran</b>	<b>100,00%</b>	<b>Menunjang</b>
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	100,00%	Menunjang
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100,00%	Menunjang
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100,00%	Menunjang

				<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran</b>	<b>100,00%</b>	<b>Menunjang</b>
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100,00%	Menunjang
				<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan</b>	<b>100,00%</b>	<b>Menunjang</b>
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	100,00%	Menunjang
1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	63,65				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,34				
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan</b>	<b>100,00%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang

				Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,0 0%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,0 0%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,0 0%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,0 0%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,0 0%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,0 0%	Menunjang
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,0 0%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,0 0%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100,0 0%	Menunjang

					Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
				<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir</b>	100,0 0%	<b>Menunjang</b>
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,0 0%	Menunjang
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,0 0%	Menunjang
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Menunjang</b>
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,0 0%	Menunjang
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,0 0%	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,0 0%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,0 0%	Menunjang
				<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,0 0%	Menunjang

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	Menunjang
				<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100,00%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	Menunjang

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

## B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	448.150.650	365.888.750	82%
1.1	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	298.230.650	222.013.250	74%
1.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	5.100.000	5.100.000	100%
1.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	900.000	900.000	100%

1.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.500.000	50.276.000	100%
1.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	240.695.650	164.702.250	68%
1.1.7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1.035.000	1.035.000	100%
1.2	<b>KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PERATURAN BUPATI/ WALI KOTA</b>	<b>149.920.000</b>	<b>143.875.500</b>	<b>96%</b>
1.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	149.460.000	143.633.000	96%
1.2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	460.000	242.500	53%
2	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>176.150.000</b>	<b>170.719.700</b>	<b>97%</b>
2.1	<b>KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>176.150.000</b>	<b>170.719.700</b>	<b>97%</b>
2.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	175.000.000	170.719.700	98%
2.1.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	1.150.000	1.150.000	100%
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>255.585.700</b>	<b>253.133.400</b>	<b>99%</b>
3.1	<b>KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>102.495.700</b>	<b>100.867.500</b>	<b>98%</b>
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	93.091.300	91.567.500	98%
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.208.000	2.190.000	99%
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.449.000	1.440.000	99%
3.1.4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	5.747.400	5.670.000	99%
3.3	<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>	<b>150.000.000</b>	<b>149.190.900</b>	<b>99%</b>

3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	150.000.000	149.190.900	99%
3.4	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA</b>	<b>3.090.000</b>	<b>3.075.000</b>	<b>100%</b>
3.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	3.090.000	3.075.000	100%
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>11.262.542.450</b>	<b>11.044.392.105</b>	<b>98%</b>
4.1	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>520.400</b>	<b>512.000</b>	<b>98%</b>
4.1.1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.100	128.000	98%
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	65.050	64.000	98%
4.1.3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	65.050	64.000	98%
4.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	65.050	64.000	98%
4.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	65.050	64.000	98%
4.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.050	64.000	98%
4.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.050	64.000	98%
4.2	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.640.574.950</b>	<b>7.428.038.257</b>	<b>97%</b>
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.640.444.850	7.427.910.257	97%
4.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.050	64.000	98%
4.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.050	64.000	98%
4.3	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>130.100</b>	<b>128.000</b>	<b>98%</b>
4.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	65.050	64.000	98%
4.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.050	64.000	98%
4.4	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>68.415.000</b>	<b>68.415.000</b>	<b>100%</b>
4.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.415.000	68.415.000	100%

4.5	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	15.291.300	15.275.400	100%
4.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.782.500	9.782.500	100%
4.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.349.900	1.334.000	99%
4.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.158.900	4.158.900	100%
4.6	<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.497.687.500	3.492.551.948	100%
4.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	111.314.448	98%
4.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.383.687.500	3.381.237.500	100%
4.7	<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	39.923.200	39.471.500	99%
4.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.923.200	39.471.500	99%

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
				(RP)	(RP)		
Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	8,02%	3,09%	38,53%	12.142.428.800	11.834.133.955	97%	3%
Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	95,00%	100,00%	105,26%	800.450.650	707.328.150	88%	12%
Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	67,00%	75,00%	111,94%	255.585.700	253.133.400	99%	1%

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	61,25	63,65	103,92%	11.262.542.450	11.044.392.105	98%	2%
	86,00	82,34	95,74%				

Uraian penjelasan tabel:

1. Tujuan Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dengan indicator Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada, capaian kinerjanya adalah 38,53%, capaian anggarannya sebesar 97%.
2. Sasaran Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian Masyarakat dengan indicator Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan, capaian kinerjanya adalah 105,26%, capaian anggarannya sebesar 88%.
3. Sasaran Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time dengan indicator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time, capaian kinerjanya adalah 111,94%, capaian anggarannya sebesar 99%.
4. Sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat dengan indicator:
  - a. Nilai SAKIP PD , capaian kinerjanya adalah 103,92%, capaian anggarannya sebesar 98%.
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian kinerjanya adalah 95,74%, capaian anggarannya sebesar 98%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada dengan capaian kinerja sebesar 38,53% (kategori sangat rendah)
- Sasaran 1 Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat yang dapat diselesaikan dengan capaian kinerja sebesar 105,26% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran 2 Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time dengan capaian kinerja sebesar 111,94% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 3 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP PD dengan capaian kinerja sebesar 103,92% (kategori sangat tinggi) dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 95,74% (kategori sangat tinggi)





Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.142.428.800 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.834.133.955 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 97% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 3%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 03 Februari 2026  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKALAN



MOH. HASBULLAH, SE., MM  
NIP. 19720131 200801 1 007

PARAF KOORDINASI		
NAMA	JABATAN	PARAF
YUDI INDRA SETIAWAN,SE	SEKRETARIS	
ARIEF EKA PUTRA, SH	KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	
AHMAD NIZAR WADOED, SH	KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
YUDISTIRO ARDI NUGROHO, ST.,MT	KABID PERUNDANG- UNDANGAN	
MOCHAMMAD ARIEF MAHMUD, SP.,MM	KABID PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	